

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BONGKAL MALANG KECAMATAN
KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu
Bidang ilmu sosial program studi administrasi publik
Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas islam riau

Rika Ardila

NPM : 157110533

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud sukur kupersembahkan kepada tuhan yang maha esa atas takdirmu telah kau jadikan hamba manusia berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan selama ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita yang selama ini aku inginkan.

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Khusus untuk ayahanda japri bersama ibunda rumlah yang tercinta. Terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah beliau curahkan kepadaku, semoga allah swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada beliau, aamiin...

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga allah swt mencatatnya sebagai amal baik beliau dan membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal aamiin...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian skripsi ini yang berjudul “analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan didesa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu”. Yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau .

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dariberbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau Yang Telah Menyediakan Fasilitas Dan Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Dalam Menimba Ilmu Pada Lembaga Pendidikan Yang Beliau Pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Zulkifli.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Kepada Penulis Dan Selalu Mendukung, Menyemangati Serta Mengingatkan Penulis Apabila Lalai Dalam Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.
5. Bapak Drs. Parjiyana.,M.Si Yang Juga Selaku Dosen Pembimbing II, Yang Telah Memberikan Arahan Dan Bimbingan Dengan Sabar Untuk Meluangkan Waktunya, Tenaga Dan Fikiran Serta Selalu Memotivasi Dan Juga Mengingatkan Penulis Untuk Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini Serta Menyelesaikan Studi Tepat Waktu.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Yang Dalam Hal Ini Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu Yang Mana Telah Mendidik Dan Memberikan Dorongan Serta Arahan Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/Ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Dan Serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Perpustakaan Universitas Islam Riau Yang Telah Membantu Penulis Menyelesaikan Administrasi Membantu Penulis Menyelesaikan Administrasi Mengenai Surat Menyurat Dan Keperluan Penulis Yang Berhubungan Dengan Penyelesaian Skripsi Ini.
8. Kedua Orang Tua Tercinta, Kepada Ayahanda japri Dan Ibunda Rumlah terimakasih Telah Memberikan Dukungan Materil Maupun Moral. Serta

Terimakasih Kepada Seluruh Keluarga Yang Telah Memberikan Motivasi Penulis Untuk Dapat Menyelesaikan Skripsi Penelitian Ini.

9. Teman-Teman Seangkatan Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2015 Marsha Chintia, Nova Yana Lestari Serta Teman Seperjuangan Dikos Pink Desi Hartika Dan Riana Rosita Dewi.
10. Teman-Teman Kelas AP B Terutama Untuk Para Sahabatku Desi, Etty, Irma, Netty, Rani, Ria Dan Teman-Teman Yang Lainnya Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Semuanya Yang Selalu Membuat Hari-Hari Perkuliahan Menjadi Menyenangkan.

Semoga Tuhan Memberikan Pahala Atas Jasa Dan Kebaikan Mereka Semua. Penulis Menyadari Bahwa Penulisan Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kata Sempurna, Untuk Itu Penulis Harapkan Saran Dan Kritik Yang Sifatnya Membangun Demi Kesempurnaan Penulisan Skripsi Ini.

Akhir Kata Penulis Berharap Semoga Skripsi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Pihak Yang Membutuhkan Dan Semoga Ilmu Yang Penulis Peroleh Dapat Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa. Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Penulis

Rika ardila

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
.....	xvi
ABSTRAK	xvii
.....	xvii
ABSTRACT	xviii
.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian	10
1. Tujuan penelitian.....	10
2. Manfaat penelitian.....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi kepustakaan	11
1. Konsep administrasi	11
2. Konsep organisasi	14
3. Konsep manajemen	15
4. Konsep pelaksanaan tugas.....	17
5. Konsep kepala desa	19
6. Konsep pemerintah desa.....	21
7. Konsep pembangunan	24
8. Konsep pembangunan desa	29
B. Kerangka pikir.....	36
C. Hipotesis	37
D. Konsep operasional	37
E. Operasional variabel.....	39
F. Teknik pengukuran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian.....	45
B. Lokasi penelitian	45
C. Populasi dan sampel.....	46

D. Teknik penarikan sampel	47
E. Jenis dan sumber data.....	47
F. Teknik pengumpulan data.....	48
G. Teknik analisis data.....	49
H. Jadwal kegiatan penelitian	49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bongkal Malang	51
1. Sejarah desa.....	51
2. Demografi.....	52
3. Keadaan sosial.....	53
4. Kondisi ekonomi	54
B. Kondisi pemerintahan desa	55
1. Pembagian wilayah desa	55
2. Struktur organisasi pemerintahan desa.....	56
C. Masalah dan potensi desa.....	57
1. Bidang infrastruktur desa/sarana prasarana.....	57
2. Bidang pendidikan.....	57
3. Bidang ekonomi	58
4. Bidang pemerintahan.....	58
D. Potensi desa.....	59
1. Potensi sumber daya alam	59
2. Potensi sumber daya manusia	59
3. Sumber daya sosial.....	60
4. Sumber daya ekonomi	60
E. Rencana pembangunan jangka menengah desa	61
1. Visi desa	62
2. Misi desa	62
F. Kebijakan pembangunan desa.....	62
1. Arah kebijakan pembangunan desa.....	63
2. Program pembangunan desa.....	65
G. Strategi pencapaian	66

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas responden.....	68
B. Analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN	92
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
I. 1 : Rencana Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Bongkal malang Tahun Anggaran 2018	7
II.1 : Operasional Variabel Tentang Analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten IndragiriHulu.....	39
III. 1 : Populasi Dan Sampel Penelitian analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Didesa Bongkal Malang	46
III. 2 : Jadwal Pelaksanaan Analisis Pelaksanaan TugasKepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	49
V. I : RespondenPenelitianBerdasarkanJenisKelamin.....	68
V.2 : Responden Penelitian Berdasarkan Umur.....	69
V.3 : RespondenPenelitianBerdasarkan Tingkat Pendidikan	70
V.4 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Penyusunan Rencana Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	72
V.5 :Realisasi Data Sekunder Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Perencanaan Pembangunan.....	74
V.6 :Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Penetapan Rencana Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	75
V.7 :Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana PembangunanTentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan	

Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	78
V.8 : Realisasi Data Sekunder Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.....	81
V.9 : Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.....	82
V.10 : Realisasi Data Sekunder Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Tahap Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	84
V.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	36
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuisisioner Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	93
2 : Daftar Wawancara Penelitian Untuk Kaur Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	105
3 : Rekap Telly Data Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	108
4 : Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	112
5 : SK Dekan Fisipol UIR Nomor : 652/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An.Rika Ardila	117
6 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/26081	118
7 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor : 134/E-UIR/27 Fs/2019	119
8 : Surat Keterangan Dari Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 170/Sk/2021/Viii/2019	120

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang Bertanda Tangan Di Bawahini :

Nama : Rika Ardila
NPM : 157110533
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Univeristas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2019

Pelaku pernyataan,

Rika ardila

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DIDESA BONGKAL MALANG KECAMATAN
KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Abstrak

oleh

Rika Ardila

Kata Kunci : Analisis, Tugas Kepala Desa, Pembangunan

Mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Maka salah satu aspek yang perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya. Pemerintah desa dan aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Salah satu desa yang sedang menjalankan pembangunan fisik ialah desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survey dimana data dan informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dilapangan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan setiap indikator dan menggali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa bongkal malang. Setelah penelitian dilakukan, kemudian di kelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan secara kuantitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Selanjutnya untuk mengumpulkan data penulis menggunakan observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data penelitian. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu berada pada kategori cukup terlaksana.

**IMPLEMENTATION ANALYSIS OF VILLAGE HEAD DUTIES IN
DEVELOPMENT IN VILLAGE THE DISTRICT BONGKAL MALANG
KELAYANG INDRAGIRI HULU DISTRICT**

Abstract

by

Rika Ardila

Keywords: Analysis, Task of the Village Head, Development

Considering the village government is the lowest base of government in the structure of the Indonesian government which is crucial for the success of efforts in overall national development. "Then one aspect that needs to be built is to increase the ability of village government officials in carrying out administrative tasks, in addition to strengthening community participation and institutions". "The village government and its officials are administrators as the main organizers of government, development and community activities as well as guiding peace and order in his territory ". "One of the villages that are carrying out physical development is the bongkal malang village, kelayang district, indragiri hulu district. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Head's tasks in physical development. "The type used in this study is the type of survey research in which data and information collected through field observations and serve as a basis for describing each indicator and dig deeper into matters relating to the object of research". "The location of the study was carried out in Malang bongkal village". "After the research is carried out, then grouped according to the type and type of data and added with quantitative information that is supportive in explaining the results of the study. The research method used is a quantitative method. Furthermore, to collect the data the author uses observation, interviews, questionnaires, and documentation as a research data collection tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the analysis of the implementation of the tasks of the village head in development in the bongkal malang village kelayang district of indragiri hulu was in the moderately implemented category.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perubahan menuju kearah yang dicapai. Dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alenia 4 dinyatakan bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintahan baik dalam pelaksanaan azas desentralisasi maupun dekosentrasi. Dalam pelaksanaan tugas dekosentrasi disusun perangkat pemerintahan mulai dari Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan sampai pada tingkat Desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan Dalam Undang-Undang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan adalah urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. Urusan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengenai pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu yang terselenggara oleh Kepala Desanya cenderung bersifat top down, yang tidak menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sangat minimal. Terjadi penyimpangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa, bahwa kebijakan pembangunan desa (Bangdes) digunakan untuk program yang diprioritaskan masyarakat desa.

Pada pasal 26 yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berisi tentang Tugas Kepala Desa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas Kepala Desa Adalah Sebagai:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Kepala Desa meskipun sebagai pimpinan di desa yang harus mampu memelopori pembangunan harus didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa

harus mampu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, kepala desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha ekonomi desa dan mengembangkan keuangan deaa. Sebagai pembuat kebijaksanaan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk, Kepala Desa juga sekaligus sebagai pelaksana kebijaksanaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan di desanya. Agar pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, maka Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun desanya.

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik mana kala tidak dijunjung dari aparatnya dengan aparat. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penduduk asli Desa bongkal malang adalah suku melayu, seiring dengan perkembangan penduduk Desa bongkal malang sudah bervariasi yaitu ada yang dating dari Provinsi Sumatera Utara dan sebagian lagi dari Pulau Jawa sebagian kecil berasal dari Sumatera Barat. Dengan bervariasi inilah tercipta suatu nilai positif dimasyarakat yang saling memahami dan menghormati tradisi-tradisi yang di bawah oleh berbagai suku tersebut.

Infrastruktur fisik atau pembangunan fisik sangatlah penting bagi perkembangan masyarakat dan desa itu sendiri. Untuk itu desa bongkal malang

Kecamatan kelayang sedang berusaha membangun berbagai macam pembangunan dan telah direncanakan dalam program rencana kerja pembangunan desa. Namun pembangunan yang dilaksanakan masih belum terlihat jelas. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Desa.

Pada pasal 26 yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Selanjutnya koordinasi dilakukan oleh Kepala Desa dengan berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan (dalam Handyaningrat, 1991:89) bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam pencapaian tujuan bersama.

Dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bongkal malang bersumber dari bantuan dana pemerintah dan masyarakat sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah.
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Sumber Kekayaan Desa.
3. Swadaya Masyarakat/Partisipasi Aktif Masyarakat.

Dapat penulis gambarkan bahwa dari ketiga Sumber Dana tersebut diatas diramu didalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang

kemudian menjadi Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

jika dikaitkan dengan pengertian diatas dan dikaitkan dengan sejumlah program pembangunan. Prinsip keterangan tahun tugas akhir di Desa bongkal malang Sebagaimana data tabel berikut:

Tabel I.1 Pembangunan Yang Terlaksana Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017

No	Kegiatan	Volume	Satuan
1	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan pemukiman. - Perkerasan jalan didusun IV - Pembuatan badan jalan didusun I	1 1	LS LS
2	Pembangunan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani. - Perkerasan jalan didusun III	1	LS
3	Pembangunan/pemeliharaan jembatan desa. - pembangunan box culvert didusun IV	1	LS

(Sumber: Data APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2017)

Dari tabel 1.1 diatas adalah jenis kegiatan pembangunan yang terlaksana yang ada didesa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu.

Dari tabel diatas dapat dilihat pembangunan yang dilokasikan yaitu Pembuatan

badan jalan didusun I, Perkerasan jalan didusun III dan IV serta pembangunan box culvert di dusun IV.

Pembangunan fisik di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagian besar dibiayai dari APBN di proyek pembangunan fisik. Meskipun beberapa pembangunan fisik sudah dilaksanakan di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, namun hasilnya belum optimal sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukannya koordinasi pemerintah desa dan kesungguhan dari aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan serta menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum Desa. Namun hal itu tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat seutuhnya, karena berbagai kelemahan dijumpai dilapangan, ditambah lagi adanya kecenderungan perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan dan akhirnya akan menunjukkan belum tercerminnya kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara maksimal.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah pentingnya pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pimpinan diwilayah desa bongkal malang dalam memajukan pembangunan desa. Berkenaan dengan hal pembangunan Desa di bongkal malang penulis mendapati beberapa Fenomena, diantaranya:

1. Diindikasikan dimana kurangnya pertemuan resmi oleh Kepala Desa untuk membicarakan masalah pembangunan fisik yang ada di Desa bongkal malang.
2. Kerja sama antara pemerintah desa setempat dan masyarakat masih rendah dalam proses pembangunan fisik yang ada didesa bongkal malang.
3. Hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa bongkal malang masih belum tepat pada sasaran sesuai yang dibutuhkan, sehingga diperlukannya pertemuan informal antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam proses pembangunan tersebut kemudian memberikan pengarahan agar pelaksanaan pembangunan fisik cepat terealisasi.
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi dari tim ataupun organisasi yang ada didesa bongkal malang dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik oleh kepala desa.

Melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten indragiri hulu tentang pembangunan Desa, timbul keinginan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan masalah

Melihat dari gejala permasalahan yang ada di Desa bongkal malang mengenai pembangunan sarana dan prasarana yang tidak terawat dan berfungsi

semestinya, dan kurangnya motivasi dari Kepala Desa mengenai arti penting pembangunan Desa dan menjaganya. Maka sebagai dasar perumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana pelaksanaan tugas kepala Desa dalam pembangunan di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten indragiri hulu”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian maka seorang peneliti akan lebih terarah kemana akan difokuskan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini ”Untuk Mengetahui pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten indragiri hulu”.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktisnya dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan ditempat penelitian dilakukan.

b. Manfaat akademis

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah, terutama yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep administrasi

(siagian, 1999;4) Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya adalah administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar pekerjaan yang dilaksanakan tercapai sesuai yang diinginkan.

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, siagian (2003;2-3).

Administrasi sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern (social phemomena), secara ekplisit tergambar pendapat waldo (1992;2), yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Batasan administrasi yang menekankan pentingnya aspek rasionalitas juga dikemukakan oleh Siagian (dalam Zukifli dan Moris Adidi Yogya, 2014;11), yaitu keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hierarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini. Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 1992;11).

Terdapat tiga pengertian substansional yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut.

Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu, dan tempat dimana dia dijalankan.

1. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan, untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.

2. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru. dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal perbedaan. tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Harbert A. Simont (dalam siagian, 1986:5) yaitu ada dua orang yang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh seorang diantara mereka, pada saat itu administrasi sudah ada.

Definisi administrasi yang secara implisit menggambarkan kesepuluh dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie (dalam zulkifli dan moris adidi yogia, 2014;14). administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh segenap kelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu. pekerjaan pokok yang dimaksud unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatahubung)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansial (tatakeuangan)
7. Material (tatapembekalan)
8. Relasi publik (tatahumas)

Definisi konsep administrasi dalam arti luas bertitik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatar belakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah ditulis. Para sarjana dan pakar pemerhati studi organisasi dalam merumuskan definisi organisasi cenderung untuk tidak lepas dari perspektif

mereka terhadap peranan setiap aspek dan dimensi yang melingkupi organisasi itu. Siagian (2003;6) merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut lawan.

2. Konsep organisasi

Organisasi adalah suatu sistem yang bersifat sosio-teknis. Sistem adalah suatu keseluruhan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan. Dinamis berarti bergerak, berkembang kearah suatu tujuan. Sosio (sosial) berarti yang bergerak didalam didalam dan yang menggerakkan sistem itu ialah manusia (kadarman & udaya, 1992;7)

kesatuan-kesatuan sosial yang diarahkan kesuatu tujuan, sistem-sistem aktivitas yang distruktur dengan sengaja dan mempunyai batasan-batasan yang dapat diidentifikasi, Menurut Daft (dalam kadarman & udaya, 1992;7)

Menurut siagian, (2003;25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang lebih yang bekerja samaserta secara formal dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan

Organisasi adalah suatu faktor yang lebih luas yang berkenaan dengan proses pengorganisasi, struktur sebuah organisasi, dan proses-poses yang terjadi dalam suatu organisasi (sufian, 1995;163)

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:75) sebagai berikut:

- a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
- c. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilaksanakan secepatnya
- e. Kesatuan komando atau hierarki
- f. Komunikasi
- g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
- h. Kontunuitas
- i. Saling asuh antara institusi lain dan staf
- j. Koordinasi
- k. Kehayatan

menurut hicks (2002:12) ada dua macam organisasi : organisasi formal, suatu struktur organisasi yang mempunyai dan dinyatakan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, mempunyai rincian, pekerjaan yang jelas bagi setiap anggota mulai dari status, gaji, pangkat, dan penghasilan yang diatur secara baik. organisasi formal biasanya tahan lama dan terencana sebab penempatannya sesuai dengan peraturan. beberapa contoh organisasi formal : perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, dan universitas-universitas.

Organisasi informal : suatu struktur organisasi yang tersusun secara bebas dan fleksibel, dalam organisasi informal keanggotaan seseorang mungkin hanya tumbuh oleh waktu situasi yang pasti dari hubungan antara para anggota dan bahkan tujuan organisasi tidak rinci dan dalam waktu yang tidak ditentukan.

3. Konsep manajemen

Ada berbagai macam definisi manajemen, misalnya manullang (dalam ratminto dan atik septi winarsih,2005;1), mendefinisikan manajemen sebagai:

“seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

Menurut Terry (2006:2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.

menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain, Terry (dalam Priansa & Agus Garnida, 2013;29).

Menurut hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut fayol (2002:45) ada 13 azas-azas manajemen antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian kerja
2. Wewenang dan tanggung jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan arah
6. Kepentingan individu dibawah kepentingan umum
7. Gaji pegawai
8. Sentralisasi
9. Ketertiban
10. Keadilan
11. Kestabilan masa kerja pegawai
12. Inisiatif
13. Kesatuan jiwa kooperatif

Menurut siagian (2003;5), Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang,yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen merupak inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

definisi konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula, Terry (dalam Zulkifli Dan Moris Adidi Yogja,2014;18)

Definis konsep manajemen yang menunjukkan secara ekplisit esensialnya penataan terhadap sumberdaya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The liang gie (dalam Zulkifli Dan Moris Adidi Yogja,2014;18).

manajemen yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang. Menurut Terry manajemen merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang agar tujuan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, Terry (dalam Zulkifli Dan Nurmasari, 2015;5).

4. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan Desa yang baik merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan tertentu

yang dicapai melalui pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintahan Desa itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.

Menurut Agus Dharma (2005:9) mengatakan Pelaksanaan adalah sesuatu bagian yang dikerjakan atau oleh suatu produk jasa yang dihasilkan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Sedangkan Mohammad As'ad (2000:65) menyebutkan pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Winardi (1999:75) ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan waktu yang tepat
2. Jumlah output
3. kerjasama
4. Kualitas pekerjaan
agar tetap terlaksananya koordinasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka menurut Siagian (dalam Mulyasa, 2002:137) perlu melakukan cara-cara untuk mewujudkan koordinasi yang baik, yakni:

1. Memberikan pedoman
 2. Memberikan bimbingan
 3. Memberikan arahan
 4. Memberikan supervisi
- Menurut Sjafrizal (2015;137) tahapan perencanaan pembangunan

menggambarkan tugas pokok perencanaan pembangunan yaitu:

1. Tahap penyusunan perencanaan pembangunan

Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2. Tahap penetapan perencanaan pembangunan

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan

Setelah rencana tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah memastikan agar proses kegiatan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Tahap pengawasan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencanaan pembangunan masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut yang mana berguna untuk mengetahui apakah kegiatan pembangunan yang telah terlaksana dapat bermanfaat bagi masyarakat.

5. Konsep Kepala desa

Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada pasal 26 yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berisi tentang Tugas Kepala Desa:

3. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - p. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - q. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - r. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - s. Menetapkan Peraturan Desa;
 - t. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - u. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - v. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - w. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - x. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - y. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - z. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - aa. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - bb. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - cc. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

dd. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

6. Konsep pemerintah desa

Menurut Mathis dan John H. Jackson (2004;237) tugas adalah suatu aktivitas pekerjaan yang khusus dan dapat diidentifikasi terdiri dari gerakan-gerakan.

Kansil (2003;189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yaitu:

1. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku;
2. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat;
3. Prinsip koordinasi;
4. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;

5. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Menurut Soetardjo dan Yuliati (dalam Wasistiono dan Irwan Tahir 2007;7) desa berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Wasistiono dan Irwan Tahir (2007;135) susunan pemerintah desa diatur dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas: sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

Nurcholis (2011;73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat

desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil. (Nurcholis, 2011;76).

Nurcholis (2011;76) mengatakan sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. (Nurcholis, 2011;77).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, 2, 3 tentang Desa yang baru ditetapkan menjelaskan bahwa:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Selanjutnya pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan pengaturan desa. Dimana pengaturan desa itu bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 12 dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa;
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
3. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
4. Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
7. **Konsep pembangunan**

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan, dll. Pembangunan itu sendiri berkaitan

erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan.

Menurut Galtung (2015;1) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Menurut Untoro (2015;1) juga memberikan pendapatnya bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita.

Menurut Roger dan Shoemaker (1971;45) Pembangunan adalah jenis perubahan social dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinggi pula melalui organisasi sosial yang baik.

Konsep pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (*moral hazard*) yang dipenuhi

kepentingan tertentu (*vested interest*) dari keuntungan semata (*rent seeking*). Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (*inter-region*) dan waktu (*inter-generation*). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004;19).

Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004;21).

pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa, menurut Rogers (dalam rochajat,dkk, 2011;3). Selanjutnya pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju, menurut Rostow (dalam Abdul, 2004;89).

Menurut Siagian, (1981;21) mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.

Menurut (Siagian, 1999;4) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai "rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Siagian mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik agar tercipta kehidupan yang lebih baik.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilakukan
2. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan
3. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain
4. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa

pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis..

Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya.

8. Konsep pembangunan desa

Menurut Kartasasmita (2001;66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001;46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001;222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Sebagaimana diatur didalam peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

mekanisme perencanaan pembangunan desa terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri No 20 tahun 2018

Pasal 31

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- 2) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- 3) Materi muatan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa
 - d. Hal khusus lainnya
- 4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

Pasal 32

- 1) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan
- 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya
- 5) Kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 33

- 1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), kepala desa menyampaikan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa.
- 2) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 34

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- 2) Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
- 3) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar
 - b. Rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa
 - c. Peraturan desa mengenai RKP Desa
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

- e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
- f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia, dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPD

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabuapten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 tahun dan
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral, daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan terhitung sejak ditetapkan APBDesa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah didesa dicatat dalam APBDesa. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program pemerintah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981;63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut:“Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang

diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.”

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah *developmen*, sekalipun istilah *development* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rurar development*. Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan. perubahan sosial melalui modernisasi.

Didalam pembangunan masyarakat desa masih terdapat permasalahan yang sangat relevan dibahas karena perkembangan pembangunan hanya berkecimpung di daerah perkotaan sementara secara umum Negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Walaupun pada masa pemerintahan Orde Baru telah mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan (memprihatinkan).

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak hanya semata-mata pada sector pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan terlepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara. Sementara itu, pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan pedesaan yang sangat luas.

Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa yang dipimpinnya diharapkan dapat membawa perkembangan yang positif dalam segi pembangunan. Baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya masyarakat desa itu sendiri.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses

masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

B. kerangka pikir

Gambar II. 1 : Analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2019

C. Hipotesis

Berdasarkan yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, dan diperjelas pada rumusan masalah, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Diduga pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan belum terlaksana dengan baik sehingga pembangunan fisik yang ada tidak terealisasikan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

D. Konsep operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan masing-masing pengertian konsep operasionalnya, yaitu sebagai berikut:

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian

4. Pelaksanaan tugas kepala desa adalah seseorang pimpinan disuatu wilayah yang disebut Desa atau dengan nama lain yang diberi amanah dalam suatu situasi atau keadaan menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Aparat Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.
5. Pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (Self Sustaining Proses) tergantung kepada manusia dan struktur sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negarakesatuan republik indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat desa dalam penelitian ini adalah terdiri dari sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan dan kepala dusun

9. Penyusunan perencanaan pembangunan adalah menyusun rancangan rencana pembangunan yang secara formal yang merupakan tanggung jawab pemerintah desa bongkal malang
10. Penetapan perencanaan pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku resmi jika telah mendapat pengesahan dari BPD desa bongkal malang
11. Tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya
12. Tahap pengawasan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

E. Operasional variabel

Operasional Variabel penelitian tentang analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel II 1: Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis pelaksanaan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator Variabel	Item Penilaian	Skala
Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai "rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan	Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal	1. Tahap penyusunan perencanaan pembangunan	a. Pembentukan tim penyusun b. Sumber pembiayaan c. Penyusunan rencana pembangunan desa	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

<p>perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (<i>nation-building</i>). Siagian mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik agar tercipta kehidupan yang lebih baik. (siagian, 1999;4)</p>	<p>Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu</p>	<p>2. Tahapan penetapan perencanaan pembangunan</p> <p>3. Tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan</p>	<p>d. Musyawarah desa e. Rencana kerja pembangunan desa</p> <p>a. Memberikn gagasan/usulan b. Program pembangunan desa c. Rencana pembangunan desa d. Menggerakkan masyarakat</p> <p>a. Pembangunan sesuai rencana b. Pembangunan sesuai persyaratan c. Mengkaji ulang pembangunan desa d. Pengawasan pembangunan desa</p> <p>a. Sosialisasi pembangunan desa b. Manfaat</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p> <p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>
---	---	---	--	---

		4. Tahap pengawasa n keberhasila n pelaksanaa n pembangun an	pembanguna n desa c. Sumberdaya pembanguna n desa d. Anggaran rencana pembanguna n desa	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
--	--	--	---	---

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang terjadi. Dengan sekala linkert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (sugiono, 2003:107).

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel dan indikator variabel perencanaan pembangunan, maka teknik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksana, dengan bobot nilai 3.
2. Cukup terlaksana, dengan bobot nilai 2.
3. Kurang terlaksana, dengan bobot nilai 1.

Untuk mengetahui hasil penilaian dengan menggunakan teknik skoring dari skor tertinggi, terendah dan interval kelas, dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

Skor tertinggi = Jumlah responden \times jumlah item pertanyaan \times nilai tertinggi

Skor terendah = Jumlah responden \times jumlah item pertanyaan \times nilai terendah

Interval = $\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{Skala pengukuran}}$

Pengukuran yang digunakan untuk penilaian pada persentasi (%) dapat dikategorikan “Terlaksana” dengan persentasi 67%-100%, untuk kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentasi 34%-66%, untuk kategori “Kurang Terlaksana” dengan persentasi <34%.

Variabel ini diukur dengan mengajukan 17 pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang. berdasarkan skor yang telah ditetapkan didapat bahwa skor tertinggi adalah 1989 dan skor terendah 663 dengan interval 442 dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : apabila semua kriteria indikator pembangunan terlaksana berada dalam interval 1548-1989 dengan persentase 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : apa bila semua kriteria indikator pembangunan terlaksana berada dalam interval 1106- 1547 dengan persentase 34%-66%

Kurang terlaksana : apabila semua kriteria indikator pembangunan berada dalam interval 442-1105 dengan persentase <34% dari jawaban responden

Adapun untuk indikator pelaksanaan pembangunan teknik pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 5 pertanyaan dengan skor tertinggi 585 dan skor terendah 195 dengan interval 130

terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 456-585 dengan persentase 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 326-455 dengan persentase 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 130-325 dengan persentase <34% dari jawaban responden

2. Penetapan perencanaan pembangunan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dengan skor tertinggi 468 dan skor terendah 156 dengan interval 104

terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 365-468 dengan persentase 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 261-364 dengan persentase 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana: apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 104-260 dengan persentase <34% dari jawaban responden

3. pelaksanaan perencanaan pembangunan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dengan skor tertinggi 468 dan skor terendah 156 dengan interval 104

Terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 365-468 dengan persentase 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana: apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 261-364 dengan persentase 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana: apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 104-260 dengan persentase <34% dari jawaban responden

4. pengawasan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan

Pengukurannya adalah dengan memberikan 4 pertanyaan dengan skor tertinggi 468 dan skor terendah 156 dengan interval 104

terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 365-468 dengan persentase 67%-100% dari jawaban responden

Cukup terlaksana : apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 261-364 dengan persentase 34%-66% dari jawaban responden

Kurang terlaksana: apabila semua sub indikator variabel terlaksana berada dalam interval 104-260 dengan persentase <34% dari jawaban responden



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survei deskriptif artinya penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan alat pengumpulan data. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih Desa bongkal malang Kecamatan kelayang adalah karena penulis menemukan fenomena indikasi pembangunan yang tidak terlaksana di desa tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti di desa bongkal malang.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2017;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. dari populasi diambil sekretaris desa, kaur pembangunan, BPD, kepala dusun dan kepala keluarga yang berjumlah 673 orang dari keseluruhan populasi yang ada.

3. sampel

Sampel menurut Sugiyono (2017;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dari sampel penelitian diambil dari sekretaris desa 1, kaur pembangunan 1, BPD 9, kepala dusun 4 orang dan kepala keluarga sebanyak 24 yang berjumlah 39 responden.

Tabel III 1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenispopulasi	Populasi	sampel	Persentase (%)
1	SekretarisDesa	1	1	100%
2	Kaur Pembangunan	1	1	100%
3	BPD	9	9	100%
4	KepalaDusun	4	4	100%

5	Kepala keluarga	658	24	3,6%
Jumlah		673	39	5,79%

Sumber :Modifikasi Penulis,Tahun 2019

D. Teknik penarikan sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel pada desa , dalam hal ini kepala desa dan kaur pembangunan maka digunakan penarikan teknik *random sampling*. teknik random sampling menurut Sugiyono (2017;82) yaitu dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.menggunakan teknik *random sampling* dengan menetapkan jumlah responden sebanyak 39 orang dan dirasakan cukup mewakili responden yang lainnya.

E. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. data ini merupakan data yang sudah diolah oleh badan-badan tertentu. Data

yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang keadaan geografis
- b. Data tentang keadaan penduduk
- c. Data tentang keadaan ekonomi
- d. Dan data lainnya

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2017:137) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner, observasi dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data Tentang Analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa bongkal malang Kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang bersifat rahasia atau yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.
3. kuisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan desa.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

G. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. menurut sugiyono (2017;147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil

kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal penelitian kegiatan tentang Analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan didesa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu dimulai pada bulan februari 2019 Seperti rincian sebagai berikut :

Tabel III. 2 : Jadwal Analisis pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Didesa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2019																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan up																				
2	Seminar up																				
3	Perbaikan up																				
4	Revisi kuisisioner																				
5	Rekomendasi survay																				
6	Survay lapangan																				
7	Analisis data																				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi revisi skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bongkal Malang

1. Sejarah Desa

Desa bongkal malang adalah nama satu wilayah dikecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu, menurut sejarah dari beberapa tokoh masyarakat setempat, nama bongkal malang berasal dari suatu cerita pada tahun 1812. Yakni karena kebiasaan atau hobi masyarakat setempat dan desa-desa tetangga mengadakan permainan adu ayam atau dikenal sabung ayam. Namun pada pertandingan berikutnya masyarakat desa ini mengadakan pertandingan yang agak berbeda dari biasanya yakni adu ayam dengan manusia. Pada pertandingan ini diikuti desa-desa tetangga, dimanapada saat waktu pertandingan yang telah ditentukan tuan rumah memiliki jagoannya ayam jantan. Pertandingan ini dengan taruhan sebongkah emas, namun karena melihat pertandingan yang dianggap mustahil bagi tim lawan untuk mencapai kemenangan maka tanpa sepengetahuan dari tim lawan pihak dari desa talang japuoh memandikan ayam jantan dengan cabe giling agar bisa memenangkan pertandingan ini.

Pada saat pertandingan ternyata dimenangkan oleh desa talang japuoh berkat taktik cabe gilingnya sehingga sebongkah emas berhasil dibawa pulang oleh desa talang japuoh. Karena kesal akan kealahannya maka pemuda masyarakat mencuci tempat menaruh sebongkah emas tersebut kesebuah sungai yang disebut sungai bingkal malang yang memiliki warna

air merah seperti emas. Karena kekealahannya itu desa ini disebut desa bongkal malang.

Perkembangan sejarah telah menentukan, kepala pertama gonjong penunjukan langsung dari tokoh masyarakat setempat. Kepala desa kedua dola melalui penunjukan langsung dari tokoh masyarakat setempat, ketiga tahun 1986-2001 bujang lenga melalui pemilihan oleh masyarakat desa bongkal malang. Kepala desa ketiga 2001-2002. Kepala desa ke empat 2002-2007 Drs.sutrisno pemilihan oleh masyarakat desa bongkal malang. Kepala desa ke lima 2007-2012 nazarudin melalui pemilihan oleh masyarakat desa bongkal malang.kepala desa kelima 2012 kembali terpilih bapak nazarudin hingga sekarang (2019).

2. Demografi

Desa bongkal malang terletak diwilayah kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu provinsi riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa pondok gelugur kecamatan lubuk batu jaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa teluk sejuah-dusun tua pelang
- Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan sei lala
- Sebelah timue berbatasan dengan desa sei banyak ikan

Desa bongkal malang, sebagaimana desa-desa yang lain yang ada di indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa bongkal malang kecamatan kelayang.

a) Luas wilayah desa : 18.000 Ha

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 09 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 menit
3. Jarak ibu kota kabupaten : 69 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 80 menit
5. Jarak tempuh ke ibu kota provinsi : 190 km
6. Lama jarak ke ibu kota provinsi : 4 jam

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga : 658 KK
2. Laki-laki : 1.141 jiwa
3. Perempuan : 1.107 jiwa
4. Jumlah : 2.248 jiwa

3. Keadaan sosial

a) Pendidikan

1. SD/MI : 486 orang
2. SLTP/MTS : 420 orang
3. SLTA/MA : 137 orang
4. S1/diploma : 70 orang
5. Pra sekolah : 319 orang
6. Buta huruf : 12 orang

b) Lembaga pendidikan

1. Gedung Tk/PAUD : 1
2. SD/MI : 2 unit
3. SLTP/MI : -
4. SLTA/MA : -
5. PTA/MDA/TPQ : 7 unit

c) Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 310 KK
2. Pengguna air PAH : - KK
3. Pengguna sumur pompa : 161 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
5. Pengguna air sungai : 7 KK

d) Keagamaan

Data keagamaan desa bongkal malang tahun 2015 jumlah pemeluk:

- Islam : 2227 orang
- Katolik : 21 orang
- Kristen : -

• Hindu : -

• Budha : -

Data tempat ibadah dan jumlah tempat ibadah :

• Masjid : 2 unit

• Musholla : 6 unit

• Gereja : -

• Pura : -

• Vihara : -

4. Kondisi ekonomi

a) Pertanian

Jenis tanaman :

1. Padi sawah : 0 ha

2. Padi ladang : 0 ha

3. Jagung : 0 ha

4. Palawija : 3 ha

5. Tembakau : 0 ha

6. Tebu : 0 ha

7. Kakao/coklat : 0,5 ha

8. Sawit : 190 ha

9. Karet : 230 ha

10. Kelapa : 0,5 ha

11. Kopi : 0 ha

12. Singkong : 0 ha

13. Lain-lain : 56 ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 300 ekor

2. Sapi : 110 ekor

3. Kerbau : - ekor

4. Ayam : 850 ekor

5. Itik : 120 ekor

6. Burung : 270 ekor

7. Lain-lain : 40 ekor

c) Perikanan

1. Kolam ikan : 1 ha

2. Tambak udang : - ha

3. Lain-lain : - ha

d) Struktur mata pencaharian

Jenis pekerjaan :

1. Petani : 195 orang

2. Pedagang : 81 orang

3. Pns : 29 orang

4. Tukang : 17 orang

5. Guru : 12 orang

6. Bidan/perawat : 6 orang

7. Tni/polri	: 1 orang
8. Pensiunan	: 2 orang
9. Sopir/angkutan	: 25 orang
10. Buruh	: 195 orang
11. Jasa persewaan	: 7 orang
12. Swasta	: 5 orang
13. Lain-lain	: 111 orang

B. Kondisi Pemerintahan Desa

a) Pembagian wilayah desa

Desa bongkal malang terbagi ke dalam 4 dusun terdiri dari :

1. Dusun I	: jumlah 2 RW dan 4 RT
2. Dusun II	: jumlah 2 RW dan 4 RT
3. Dusun III	: jumlah 2 RT dan 4 RT
4. Dusun IV	: jumlah 2 RT dan 4 RT

b) Struktur organisasi pemerintahan desa

1. Lembaga pemerintah desa

Jumlah aparatur desa :

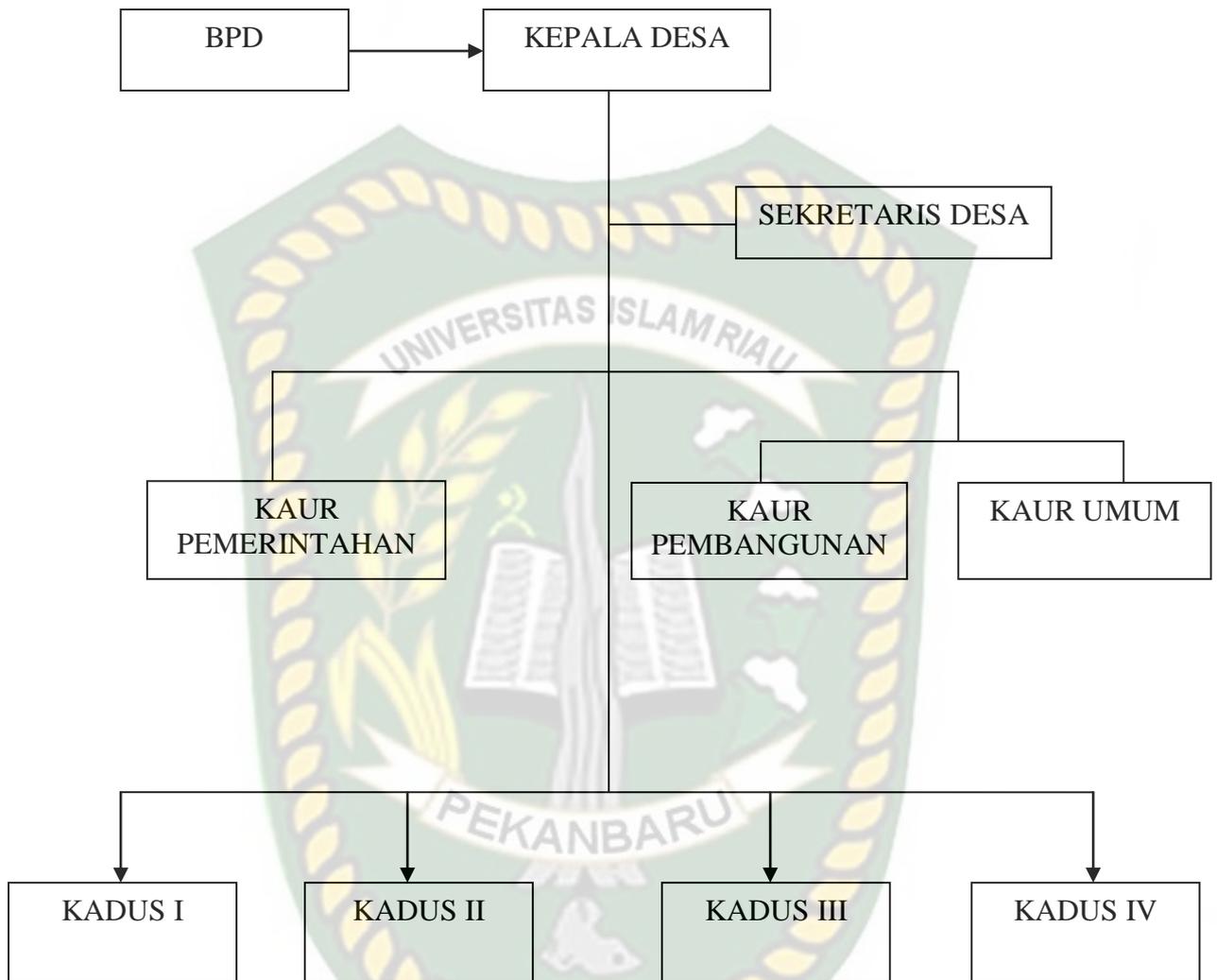
1) Kepala desa	: 1 orang
2) Sekretaris desa	: 1 orang
3) Perangkat desa	: 48 orang

2. Lembaga permusyawaratan desa (BPD)

3. Lembaga kemasyarakatan

1) LPM	: 5
2) PKK	: 6
3) Posyandu	: 5
4) Pengajian	: 5 Kelompok
5) Arisan	: 5 kelompok
6) Simpan Pinjam	: 9 kelompok
7) Kelompok Tani	: 1 kelompok
8) Gapoktan	: -
9) Karang Taruna	: 1 kelompok
10) Remaja Masjid	: 1 kelompok
11) Ormas/LSM	: -
12) Lain-Lain	: 3 kelompok

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kantor Desa Bongkal Malang kecamatan kelayang 2019

C. Masalah dan potensi desa

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools partisipatory rural apraisal (PRA) yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum desa bongkal malang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur desa/sarana prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan setapak, jalan tanah, dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
 2. Keberadaan tiang dan jaringan listrik belum terpenuhi
 3. Kebutuhan akan box culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir saat hujan.
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai
 8. Masih ada fasilitas sarana ibadah yang belum memadai
- b. Bidang pendidikan

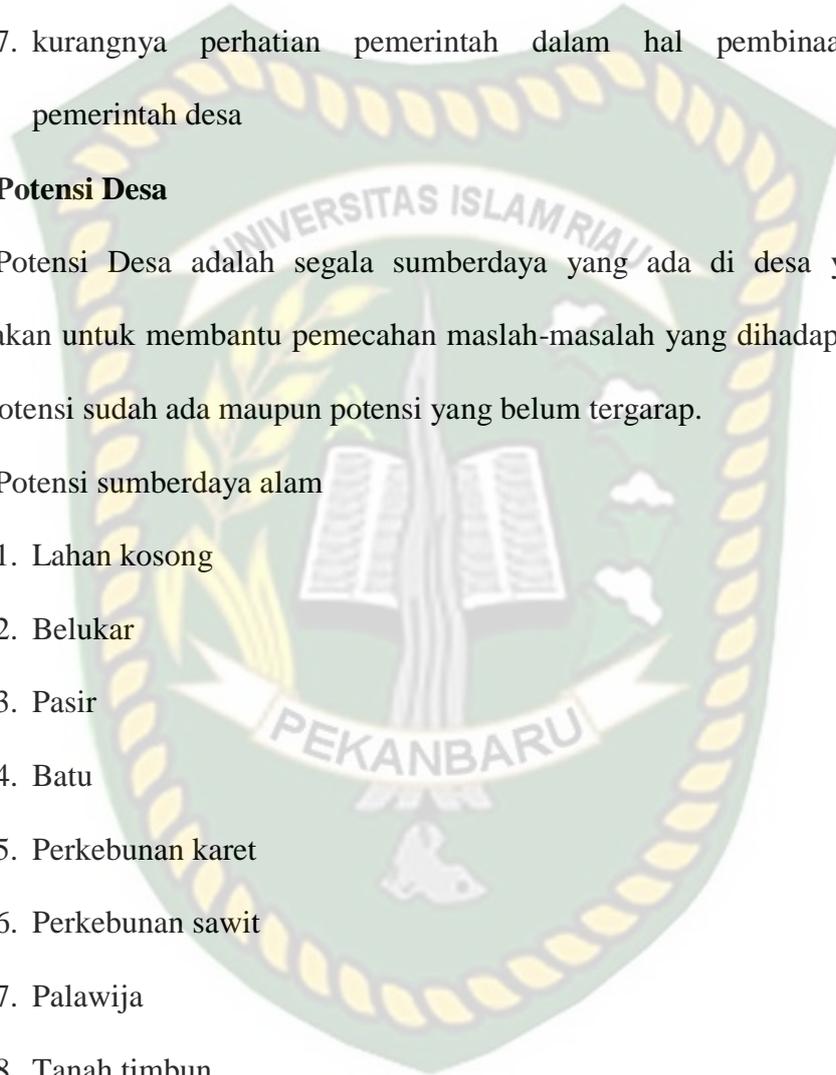
1. Bangunan pelengkap (infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang
(pagar sekolah, sound system, MCK, komputer dan lain-lain)
 2. Pustaka desa belum ada
 3. Minat baca masyarakat kurang
 4. honor guru non PNS masih kurang
 5. beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum merata
 6. belum terbentuknya PKBM (kejar paket)
 7. masih ada anak putus sekolah
 8. masih banyak masyarakat buta huruf
- c. bidang ekonomi
1. belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. lembaga ekonomi (SPP DAN UED) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. belum terlaksananya pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan usaha dan pasca panen
 4. penggalian PAD desa belum optimal
 5. rendahnya harga komoditas karet yang sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis
 6. lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum berjalannya lancar
- d. bidang pemerintahan
1. terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
 2. pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 3. pelayanan masyarakat masih belum optimal

4. regulasi desa belum dijalankan dengan baik
5. administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
6. insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
7. kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa

D. Potensi Desa

Potensi Desa adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi sumberdaya alam
 1. Lahan kosong
 2. Belukar
 3. Pasir
 4. Batu
 5. Perkebunan karet
 6. Perkebunan sawit
 7. Palawija
 8. Tanah timbun
 9. Peternakan
- b. Potensi sumberdaya manusia
 1. Aparatur desa
 2. BPD



3. Kelembagaan desa
 4. Kader desa
 5. Kader posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping desa
 8. Tokoh agama dan tokoh adat
 9. Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lain-lain
 10. Aparat keamanan (linmas)
 11. Pemuda
 12. Klub-klub olahraga
 13. Guru dan dosen
- c. Sumberdaya sosial
1. Majelis taklim
 2. Wirid yasin
 3. Guru-guru agama (ustadz/zah)
 4. Fasilitas pendidikan agama
 5. Masjid dan mushalla
 6. Peringatan hari besar islam
 7. Tokoh adat
 8. Lembaga adat
- d. Sumberdaya ekonomi
1. Lahan pertanian
 2. Lahan perkebunan

3. Kolam ikan
4. SPP Dan UED
5. Lembaga dana bergulir
6. Pedagang dan swasta
7. Pasar desa
8. Usaha galian C
9. SPBU
10. CV/PT

E. Rencana pembangunan jangka menengah desa

a. Visi dan misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa bongkal malang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa bongkal malang seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa bongkal malang.

1. Visi desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi desa bongkal malang adalah “ terwujudnya masyarakat desa bongkal malang yang sejahtera, maju, mandiri, bermartabat dan agamais dengan mengembangkan potensi sumberdaya tahun 2020”.

2. Misi desa

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat serta perkebunan
- b. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka daerah terisolasi dan mengembangkan potensi daerah
- c. Perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat
- f. Meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa
- g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, dan manajemen usaha masyarakat

F. Kebijakan pembangunan desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desadengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

agar tujuan pembangunan benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

1. Arah kebijakan pembangunan desa
 - a. Arah pengelolaan pendapatan desa
 - 1) Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat
 - 2) Identifikasi sumber pendapatan asli desa (PAD)
 - 3) Menyusun regulasi berupa peraturan desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa.
 - 4) penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa
 - 5) semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggung jawaban kepala desa kepadamasyarakat
 - b. arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa
 - 1) meningkatkan pendapatan masyarakat
 - 2) meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
 - 3) belanja kepala desa dan perangkat desa
 - 4) operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM)
 - 5) isentif dusun, RW, dan RT seta kelembagaan desa lainnya
 - 6) tunjangan operasional BPD

- 7) program operasional pemerintahan desa
- 8) program pelayanan dasar infrastruktur
- 9) program pelayanan pertanian dan perkebunan
- 10) program pelayanan dasar kesehatan
- 11) program pelayanan dasar pendidikan
- 12) program penanggulangan kemiskinan
- 13) program penyelenggaraan pemerintah desa
- 14) program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
- 15) program ekonomi kerakyatan yang produktif
- 16) program peningkatan pelayanan masyarakat
- 17) program dana bergulir, agribisnis, dan manajemen usaha
- 18) program pengelolaan tata ruang desa
- 19) program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
- 20) program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah
- 21) program pemberdayaan lembaga adat
- 22) program kerja sama desa dan antar desa
- 23) program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. kebijakan umum anggaran

pemerintah desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

2. Program pembangunan desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari visi dan misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan review terhadap RKP dan RPJM desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum program pembangunan desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. meningkatkan pendapatan masyarakat
2. meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
3. belanja kepala desa dan perangkat desa
4. operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM)
5. isentif dusun, RW, dan RT seta kelembagaan desa lainnya
6. tunjangan operasional BPD
7. program operasional pemerintahan desa
8. program pelayanan dasar infrastruktur
9. program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. program pelayanan dasar kesehatan
11. program pelayanan dasar pendidikan
12. program penanggulangan kemiskinan
13. program penyelenggaraan pemerintah desa

14. program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. program peningkatan pelayanan masyarakat
17. program dana bergulir, agribisnis, dan manajemen usaha
18. program pengelolaan tata ruang desa
19. program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah
21. program pemberdayaan lembaga adat
22. program kerja sama desa dan antar desa
23. program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

G. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa selama 6 tahun.
2. Bersama masyarakat desa, pemerintah desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun desa dengan asas-asas keadilan, partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.
3. Menyusun langkah-langkah kongkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa.

6. Melakukan pemanfaatan dan pelestarian kegiatan.
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul tentang analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan terhadap responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner serta observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi respnden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya identitas responden desa bongkal malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	24	61,54%
2	Perempuan	15	38,46 %
	Jumlah	39	100 %

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dasi tabel V.1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari perangkat desa bongkal malang , badan permusyawaratan desa, dan masyarakat lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu berjumlah 25 orang atau sama dengan 61,54% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang atau sama dengan 38,46% kemudian akan dijelaskan pembagian responden berdasarkan kelompok umur. Dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Responden penelitian berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	15	38,46%
2	31-40	7	17,95%
3	41-50	12	30,77%
4	>50	5	12,82%
	Jumlah	39	100 %

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari tabel V.2dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah adalah berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau sebanyak 38,46% dan diikuti oleh usia diantara 31-40 tahun yaitu sebanyak 7 orang atau 17,95% selanjutnya untuk usia 41-50 yaitu sebanyak 12 orang atau 30,77% dan usia >50 sebanyak 5 orang atau 12,82%. Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori usia produktif dalam pengumpulan data responden.

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuisioner ini juga terdapat identitas berupa pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	14	35,90%
2	SMP	7	17,95%
3	SMA	12	30,77%
4	SARJANA	6	15,38%
	Jumlah	39	100 %

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah sarjana sebanyak 6 orang atau 15,38% selanjutnya tamatan SMA sebanyak 12 orang atau 30,77% pendidikan SMP sebanyak 7 orang atau 17,95% dan SD sebanyak 14 orang atau 35,90%. Dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah tamatan SD dan dikategorikan cukup baik sehingga jawaban yang diberikan juga cukup baik.

B. Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Pada bagian bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap Indikator-indikator penelitian analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu.

pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sehingga demikian indikator

yang digunakan sebagai bahan analisa dengan melihat bagaimana pencapaian terhadap manfaatnya bagi kepentingan umum, kemudian dengan melihat tingkat efisiensi pelaksanaan tugas kepala desa sudah terlaksana atau tidak dan kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan terakhir adalah menganalisa bagaimana tujuan dari pemerintah desa sudah tercapai atau tidak dengan melihat tingkat perubahan dari tugas kepala desa bongkal malang tersebut. Adapun indikator pembangunan terdiri 4 tahapan yaitu pertama tahap penyusunan rencana pembangunan yang merupakan tahap awal menyusun rancangan rencana pembangunan yang mana tanggung jawab dari pelaksana pembangunan, yang kedua tahap penetapan rencana pembangunan yang merupakan tahap rencana pelaksana pembangunan yang telah disepakati oleh pelaksana pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, ketiga tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang mana proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus diawasi dengan baik, dan keempat adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang merupakan tahap akhir untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan yang dilakukan sehingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun analisisnya sebagaimana penulis kemukakan pada tabel dibawah ini:

a. Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan Oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan desa. Hasil tanggapan responden terhadap tahap penyusunan rencana pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahap Penyusunan Perencanaan pembangunan	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	Pembentukan Tim Penyusun	9 (27)	25 (50)	5 (5)	39 (82)
2	Sumber Pembiayaan	6 (18)	28 (56)	5 (5)	39 (79)
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	7 (21)	24 (48)	8 (8)	39 (77)
4	Musyawarah Desa	4 (12)	27 (54)	8 (8)	39 (74)
5	rencana kerja pembangunan desa	5 (15)	30 (60)	4 (4)	39 (79)
Jumlah skor		93	268	30	391
Kategori		Terlaksana			

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Skor tertinggi} &= 3 \times 39 \\ &= 117\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor indikator} &= 117 \times 5 \\ &= 585\end{aligned}$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{391}{585} \times 100 = 67\%$$

Dapat diketahui pada indikator pertama yang terdiri dari 5 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 9 orang dan menyatakan Cukup Terlaksana sebanyak 25 dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 5 orang.

Pada item penilaian kedua yaitu Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dengan jawaban responden yang menyatakan terlaksana yaitu sebanyak 6 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 28 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 5 orang.

Pada item penilaian ketiga yaitu Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa dengan jawaban responden yang menyatakan terlaksana yaitu sebanyak 7 dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 24 orang dan yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 8 orang.

Pada item penilaian keempat yaitu penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dengan jawaban responden yang menyatakan terlaksana sebanyak 4 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 27 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 8 orang.

Pada item penilaian kelima yaitu pembentukan tim penyusun rencana kerja pembangunan desa dengan jawaban responden yang menyatakan terlaksana sebanyak 5 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 30 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai tanggapan responden tentang Tahap Penyusunan perencanaan Pembangunan didesa bongkal malang sebanyak 67% dengan skor 391 dan berada pada 67-100%., sehingga berada pada kategori “**Terlaksana**”, yaitu tugas kepala desa dalam menentukan perencanaan pembangunan sudah diperjelas dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP) Desa bongkal malang yang telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara (10/09/2019) yang dilakukan bersama kepala desa ditempat kediaman beliau, penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik yang ada didesa bongkal malang :

“ menurut beliau, bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik, sebelum menentukan kegiatan pembangunan terlebih dahulu kita mengadakan penyusunan rencana pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan”.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 39 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang tahap penyusunan perencanaan pembangunan di desa bongkalmalang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu sudah terlaksana dan diperjelas dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP) Desa bongkal malang. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Tabel V.5 : Realisasi Data Sekunder Dalam Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Perencanaan Pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Perencanaan
1	Perkerasan Jalan	Dusun IV	1	2017
2	Pembuatan Badan Jalan	Dusun I	1	2017
3	Perkerasan Jalan	Dusun III	1	2017
4	Pembuatan Box Culvert	Dusun IV	1	2017

Sumber : RKP Desa Bongkal Malang Tahun 2017

Dari analisis tabel V.4 diatas hasil wawancara dan pengisian kuisisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari realisasi data sekunder pada Tabel V.5 diatas dapat di simpulkan adanya pelaksanaan tugas kepala desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Tahap Penetapan Perencanaan Pembangunan

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel V.6 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Penetapan Perencanaan Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahap Penetapan Perencanaan Pembangunan	Kategori penilaian			Total
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	Memberikan	8	25	6	39

	Gagasan/Usulan	(24)	(50)	(6)	(80)
2	Program Pembangunan Desa	9 (27)	17 (34)	13 (13)	39 (74)
3	Rencana Pembangunan Desa	12 (36)	18 (36)	9 (9)	39 (81)
4	Menggerakkan Masyarakat	7 (21)	20 (40)	12 (12)	39 (73)
Jumlah skor		108	160	40	308
Kategori		Cukup terlaksana			

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 39 = 117$$

$$\text{Skor Indikator} = 117 \times 4 = 468$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{308}{468} \times 100 = 66\%$$

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator kedua yang terdiri dari 4 item penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 8 dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 25 dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 6 orang.

Jawaban responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian kedua yaitu sebanyak 9 dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 17 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 13 orang.

Jawaban responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian ketiga yaitu sebanyak 12 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 18 orang dan yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 9 orang.

Jawaban responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian keempat yaitu sebanyak 7 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 20 orang dan yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 12 orang.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Tahap Penetapan Rencana Pembangunan didesa bongkal malang sebanyak 66% dengan skor 308 dan berada pada ukuran 34%-66%, sehingga dapat dikategorikan “**cukup terlaksana**”, yaitu kepala desa dalam menggerakan masyarakat untuk menentukan prioritas perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan, maka dari itu diharapkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara (10/09/2019) yang dilakukan bersama kepala desa dirumah beliau mengenai indikator tahap penetapan rencana pembangunan adalah perihal apakah ada koordinasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan:

“menurut beliau ada, mengadakan kerja sama apalagi masalah pembangunan tentunya membutuhkan kerja sama yang baik dengan organisasi-organisasi yang ada di desa bongkal malang. Selain itu kerja sama dilakukan langsung oleh tim pelaksana kegiatan sehingga pembangunan tersebut semakin cepat terealisasi”

Pada hari yang sama yaitu pada (10/09/2019) penulis juga menanyakan kepada kepala urusan pembangunan dikantor desa mengenai perihal apakah kepala desa mengadakan kerja sama antara pemerintah desa dengan organisasi lainnya mengenai pembangunan.

“ iya ada, kami ada memiliki kerjasama dalam melakukan kerja sama. Apalagi masalah pembangunan itu sangat penting. Selain itu juga kita memiliki kerjasama lainnya seperti gotong royong antara warga, kemudian rapat bersama RT-RW dan masyarakat yang ada di Desa bongkal malang”.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 39 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang tahap penetapan rencana pembangunan sudah cukup terlaksana sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti keikutertaan dalam menentukan program pembangunan, perencanaan pembangunan yang dilakukan sudah cukup terlaksana dengan baik sehingga perencanaan pembangunan bisa ditindak lanjuti.

Dari uraian diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan peneliti dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan tahap penetapan rencana, pengukuran pelaksanaan tugas pembangunan oleh kepala desa telah sesuai dengan rencana. Walaupun masih terdapat kekurangan sehingga indikator tahap penetapan rencana menurut penulis berada pada rentang cukup terlaksana karena sudah berusaha untuk memaksimalkan dalam memberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Tahap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Setelah rencana tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalau SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah memastikan agar proses kegiatan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel V.7 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

**Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Tahap pelaksanaan Perencanaan pembangunan	Kategori penilaian			Total
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	pembangunan sesuai rencana	10 (30)	16 (32)	13 (13)	39 (75)
2	pembangunan sesuai persyaratan	10 (30)	14 (28)	15 (15)	39 (73)
3	Mengkaji ulang pembangunan desa	13 (39)	15 (30)	11 (11)	39 (80)
4	pengawasan pembangunan desa	13 (39)	13 (26)	13 (13)	39 (78)
1	2	3	4	5	6
Jumlah skor		138	116	52	306
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= 3 \times 39 \\ &= 117 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Indikator} &= 117 \times 4 \\ &= 468 \end{aligned}$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{306}{468} \times 100 = 65\%$$

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator ketiga yang terdiri dari 4 item penilaian yang diberikan, tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 10 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 16 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 13 orang

tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian kedua yaitu sebanyak 10 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 14 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 15 orang.

Tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian ketiga yaitu sebanyak 13 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 15 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 11 orang.

Tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian keempat yaitu sebanyak 13 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 13 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 13 orang.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Tahap pelaksanaan Pembangunan didesa bongkal malang sebanyak 65% dengan skor 306 dan berada pada ukuran 34%-66%, sehingga dapat dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”, yaitu tugas kepala desa dalam menentukan prioritas pembangunan di desa bongkal sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara (10/09/2019) dengan kepala urusan pembangunan dikantor desa bongkal malang mengenai tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan perihal bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

“ menurut beliau, pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan harus membentuk suatu tim pelaksana. Tim pelaksana harus dibentuk untuk kader-kader yang bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Selain itu ada juga tim pelaksana yang ditunjuk oleh kepala desa dan kaur pembangunan”.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 39 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sudah cukup terlaksana sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan dengan syarat pelaksanaan yang dilakukan sudah cukup terlaksana sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan bisa ditindak lanjuti atau melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kapala desa yaitu pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan pemukiman sasaran lokasi di dusun IV dan dusun I. Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan usaha tani sasaran lokasi di dusun III. Pembangunan, pemeliharaan jembatan desa pembuatan box culvert dengan sasaran lokasi di dusun IV. Berikut Realisasi data sekunder dibawah ini :

Tabel V.8 Realisasi Data Sekunder Tentang Analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator pelaksanaan Perencanaan pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
----	----------------	--------	-------------------

1	Perkerasan jalan di dusun IV	Dusun IV	2017
2	Pembuatan badan jalan di dusun I	Dusun I	2017
3	Pekerasan jalan di dusun III	Dusun III	2017
4	Pembuatan Box Culvert di dusun IV	Dusun IV	2017

Sumber : RKP desa Bongkal Malang Tahun 2017

Dari analisis tabel V.7 di atas hasil wawancara dan pengisian kuisisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari realisasi data sekunder pada Tabel V.8 diatas dapat disimpulkan adanya pelaksanaan pembangunan terhadap tugas kepala Desa bongkal malang dalam melakukan tugasnya yaitu telah melaksanakan pembangunan di Desa bongkal malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

d. Tahap Pengawasan Keberhasilan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana pembangunan masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut yang mana berguna untuk mengetahui apakah kegiatan pembangunan yang telah terlaksana dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel V.9 Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Pengawasan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tahap Pengawasan Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Kategori penilaian			Total
		Terlaksana (3)	Cukup Terlaksana (2)	Kurang Terlaksana (1)	
1	Sosialisasi pembangunan desa	8 (24)	16 (32)	15 (15)	39 (71)
2	manfaat pembangunan desa	7 (21)	18 (36)	14 (14)	39 (71)
3	sumberdaya pembangunan desa	10 (30)	13 (26)	16 (16)	39 (72)
4	anggaran rencana pembangunan desa	9 (27)	21 (42)	9 (9)	39 (78)
Jumlah		102	136	54	292
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas teknik dan penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} = 3 \times 39 = 117$$

$$\text{Skor Indikator} = 117 \times 4 = 468$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor indikator}} \times 100 = \frac{292}{468} \times 100 = 62\%$$

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden pada indikator keempat yang terdiri dari 4 item penilaian yang diberikan, tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian yang pertama yaitu sebanyak 8 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 16 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 15 orang.

Tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian kedua yaitu sebanyak 7 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 18 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 14 orang

Tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian ketiga yaitu sebanyak 10 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 13 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 16 orang.

Tanggapan responden yang menyatakan terlaksana pada item penilaian keempat yaitu sebanyak 9 orang dan menyatakan cukup terlaksana sebanyak 21 orang dan menyatakan kurang terlaksana sebanyak 9 orang.

Berdasarkan hasil analisis tanggapan responden mengenai Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan didesa bongkal malang sebanyak 62% dengan skor 292 dan berada pada ukuran 34%-66%, sehingga dapat dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”, yaitu kepala desa melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan desa, maka dari itu diharapkan prioritas pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara (10/09/2019) dengan kepala urusan pembangunan dikantor desa bongkal malang mengenai tahap pengawasan

pelaksanaan rencana pembangunan perihal apakah pernah mengadakan pertemuan resmi adalah :

“sudah pasti ada, Pertemuan resmi sudah pernah kita lakukan apalagi dengan membahas pembangunan yang ada di Desa bongkal malang. Pertemuan ini biasanya kami adakan dalam waktu-waktu tertentu, dalam pertemuan ini biasanya kita mengumpulkan semua tokoh masyarakat dan organisasi lainnya dan saling bertukar pikiran sekaligus membahas pembangunan-pembangunan yang ada”.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap responden yang berjumlah sebanyak 39 orang responden dengan hasil pengamatan peneliti tentang tahap pengawasan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sudah cukup terlaksana sesuai dengan tanggapan responden bahwasannya seperti sosialisasi tentang manfaat pembangunan desa yang dilakukan sudah cukup terlaksana sehingga pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut realisasi data sekunder untuk indikator pengawasan pelaksanaan pembangunan yaitu :

Tabel V.10 Realisasi Data Sekunder Tentang Analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Indikator Tahap pengawasan pelaksanaan pembangunan

No	Jenis kegiatan	Waktu Pengawasan	Lokasi
1	Perkerasan jalan	2 kali dalam 3 bulan	Dusun IV
2	Pembuatan badan jalan	3 kali dalam 6 bulan	Dusun I
3	Perkerasan jalan	2 kali dalam 3 bulan	Dusun III
4	Pembuatan box culvert	3 kali dalam 1 tahun	Dusun IV

Sumber : RKP Desa Bongkal Malang Tahun 2017

Dari analisis tabel V.9 di atas hasil wawancara dan pengisian kuisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari realisasi data sekunder pada Tabel V.10 diatas dapat disimpulkan adanya pengawasan pelaksanaan pembangunan oleh kepala Desa bongkal malang dalam melakukan tugasnya yaitu telah melaksanakan pengawasan pembangunan dengan baik di Desa bongkal malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Indikator Tahapan Perencanaan Pembangunan	Pengukuran variabel			Total
		terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1.	Tahap penyusunan rencana pembangunan	93	268	30	391
2.	Tahap penetapan rencana pembangunan	108	160	40	308
3.	Tahap pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	138	116	52	306
4.	Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan	102	136	54	292
Jumlah Skor		441	680	176	1297
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber : Hasil Data Olahan Peneliti Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Skor tertinggi} &= \text{skor tertinggi} \times \text{jumlah item pertanyaan} \times \text{jumlah responden} \\ &= 3 \times 17 \times 39 \\ &= 1989\end{aligned}$$

$$\text{Jadi } \frac{1297}{1989} \times 100 = 65\%$$

Berdasarkan tabel diatas, analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan didesa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu yang disajikan dengan akurat sesuai data yang diolah sebelumnya. Dari hasil rekapitulasi, peneliti menilai bahwa pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan sudah dikategorikan **cukup terlaksana**, yaitu secara teoritis apabila sebagian besar indikator atau kriteria penilaian terjawab ini dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi dengan skor 1297 yang berada pada interval 1106-1547 dengan persentase 34-66%, sesuai dengan hasil data yang diolah dari masing-masing indikator tahapan perencanaan pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan didesa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu Dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”. terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya memelihara pembangunan desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga pembangunan infrastuktur desa. Seperti adanya masyarakat yang belum cepat tanggap dalam penanganan jalan yang rusak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu, maka dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan pembangunan desa bisa dikatakan cukup terlaksana walaupun masih

belum terelalisasi dengan baik sehingga kinerja dari pelaksana tugas pembangunan harus dioptimalkan untuk dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tujuan yang telah ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah dilakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam pembangunan didesa bongkal malang kecamatan kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis membuat kesimpulan dan saran-saran agar bisa dijadikan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

1. Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Hasil Yang Telah Penulis Jabarkan Dapat Disimpulkan Mengenai Tanggapan Responden Pada Indikator Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Didesa Bongkal Malang Berada Pada Interval **“Terlaksana”**.

2. Tahap Penetapan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Hasil Yang Telah Penulis Jabarkan Dapat Disimpulkan Mengenai Tanggapan Responden Pada Indikator Tahap Penetapan Perencanaan Pembangunan Didesa Bongkal Malang Berada Pada Interval **“Cukup Terlaksana”**.

3. Tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan

Berdasarkan Hasil Yang Telah Penulis Jabarkan Dapat Disimpulkan Mengenai Tanggapan Responden Pada Indikator Tahap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Didesa Bongkal Malang Berada Pada Interval **“Cukup Terlaksana”**.

4. Tahap pengawasan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan
Berdasarkan Hasil Yang Telah Penulis Jabarkan Dapat Disimpulkan Mengenai Tanggapan Responden Pada Indikator Tahap pengawasan Pelaksanaan keberhasilan Perencanaan Pembangunan Di desa Bongkal Malang Berada Pada Interval **“Cukup Terlaksana”**.

dapat disimpulkan yang mana jika dilihat dari empat indikator penelitian bahwa analisis pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan di desa bongkal malang kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu diaktegorikan **“cukup terlaksana”** walaupun belum terealisasi dengan sepenuhnya. proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa bongkal malang bisa berjalan dengan baik sehingga hasil dari program pembangunan yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa bongkal malang dan dapat membantu perekonomian masyarakat tersebut. Dengan adanya proses pembangunan diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap pentingnya suatu pembangunan dan ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan kehidupan masyarakat banyak terutama masyarakat yang berada di desa bongkal malang.

B. Saran

1. Perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap pembangunan secara partisipatif tersebut, mengingat banyaknya lahan kosong yang dibutuhkan oleh pemerintah desa.

2. Perlu diadakannya sosialisasi antara pihak dinas dan camat, desa dan pihak-pihak yang terkait lainnya agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa terealisasi dengan baik.
3. Perlu adanya koordinasi secara berkesinambungan dengan pihak-pihak yang terkait agar proses pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
4. Hasil pembangunan yang telah terlaksana harus dijaga dengan baik sehingga pembangunan yang ada bisa berguna bagi masyarakat dan bisa memudahkan masyarakat yang lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu. Ghalia Nasional.
- Fayol, hendry, 1993. *Pengertian, kedudukan dan perincian ilmu administrasi*. Yogyakarta, liberty.
- Hasibuan, H. Melayu, 2006. *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*. Edisi ketujuh. Jakarta, bumi aksara
- Kadarman A.M. jusuf udaya. 1997. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta, PT gramedia pustaka utama
- Kansil, C.S.T 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta, Alfabeta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Mathis, Robert L, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Edisi Kedua Salemba Empat..
- Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta, Bima Aksar.
- Priansa, Doni Juni. Agus Garnida, 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung, Alfabeta
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rusby, Zulkifli, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok, Rajawali Pers
- Sufian, 1995. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru, Uir Press
- Siagian, Sondang P, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Silalahi, Ulbert, 2009. *Study Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, Dan Dimensi*. Bandung, Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sjafrizal. 2015. *perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta, rajawali press

Terry, george R dan L. W Rue, 1988. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta, bina aksara.

The Liang Gie, 1993. *Pengertian, Kedudukan, Dan Perincian Ilmu Administrasi*.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit Fisipol UIR , Pekanbaru

Waldo, Dwight, 1996. *Pengantar Study Public Administration*. Jakarta, Bumi Aksara

Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus media, Bandung.

Zulkifli, Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

Zulkifli Dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan

Tujuh

Dokumen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal

Nendra ilyadi. 2015. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Jurnal fisip volume 2 No.1 februari 2015

Website

<http://catatanberdesa.blogspot.com/2017/01/alur-kegiatan-pembangunan-desa.html>. (diakses 14 maret 2019 pukul 21:12 wib).